

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, hal itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat berupa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut

dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah tersebut.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efektif, serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah, yang salah satunya berupa pajak dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah

dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yang mampu mengatur dan mengurus daerahnya.

Begitu pula halnya Kabupaten Bangka yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Bangka maka diharapkan Kabupaten Bangka mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bangka. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bangka, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berikut ini merupakan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka dari tahun 2011-2015 :

**Tabel I.1**  
**Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tahun 2011-2015**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
2011	40.158.249.800	42.827.312.788	106,65
2012	56.425.136.600	56.011.919.449	99,27
2013	70.651.181.600	63.015.768.007	89,19
2014	91.216.087.800	89.562.679.986	98,19
2015	100.068.489.000	116.145.760.996	116,07

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2016

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka mengalami peningkatan pendapatan dari tahun ke

tahun, tetapi jika dilihat dari tingkat efektivitas bisa dikatakan peningkatan tersebut belum efektif di 5 tahun terakhir ini, dikarenakan hanya pada tahun 2011 dan 2015 realisasi pendapatan asli daerah sudah mencapai target, sedangkan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 realisasi pendapatan asli daerah belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi PAD yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal.

Berikut ini merupakan target dan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka dari tahun 2011-2015 :

**Tabel I.2**  
**Realisasi dan Target Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011-2015**

Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011	Pajak Daerah	13.536.676.600,	11.083.716.655,	81,88
	Retribusi Daerah	8.457.073.200	8.887.668.319	105,09
2012	Pajak Daerah	23.830.000.000	14.148.439.954	59,37
	Retribusi Daerah	6.468.036.600	6.274.889.075	97,01
2013	Pajak Daerah	25.785.000.000	17.359.394.964	67,32
	Retribusi Daerah	7.479.236.600	7.790.196.517	104,16
2014	Pajak Daerah	31.000.000.000	29.279.875.692	94,45
	Retribusi Daerah	15.410.987.800	10.355.088.702	67,19
2015	Pajak Daerah	32.486.829.000	33.826.691.132	104,12
	Retribusi Daerah	9.593.791.750	7.277.685.479	75,86

Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2016

Berdasarkan Tabel I.2 dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi realisasi Pajak Daerah 5 tahun terakhir ini belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan hanya pada tahun 2015 realisasi Pajak Daerah sudah mencapai target, sedangkan tahun 2011-2014 belum mencapai target yang di harapkan. Begitu juga dengan realisasi Retribusi Daerah yang kurang efektif, dimana realisasi Retribusi Daerah mencapai target pada tahun 2011 dan 2013,

sedangkan di tahun 2012, 2014, dan 2015 realisasi Retribusi Daerah belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan pemungutan pajak dan retribusi daerah belum berkontribusi secara maksimal.

Berdasarkan data yang diterima peneliti menunjukkan pajak daerah dipengaruhi oleh beberapa jenis pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walis, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak BPHTB, dan pajak bumi bangunan, akan tetapi pada tahun 2011 dan 2012 realisasi pajak tersebut belum termasuk pajak bumi dan bangunan, sedangkan pada tahun 2013-2015 realisasi pajak tersebut sudah termasuk pajak bumi dan bangunan. Sedangkan realisasi retribusi daerah dipengaruhi oleh beberapa jenis retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Untuk mendorong efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus menjalankan sistem dan prosedur yang baik dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan pendeteksian hal-hal yang tidak diinginkan, karena pajak dan retribusi daerah sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan faktor yang penting dalam membangun suatu daerah. Semakin besar kontribusi pajak dan retribusi daerah maka daerah tersebut akan mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan

pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Dengan cara menghitung kontribusi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bangka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penulis tuangkan dalam penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka 2011 - 2015 ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Bangka tahun 2011-2015 ?
2. Bagaimana laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Bangka tahun 2011-2015 ?
3. Seberapa besar kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Bangka tahun 2011-2015 ?
4. Faktor apa yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Bangka tahun 2011-2015 ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah meneliti tentang efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka periode 2011-2015.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Bangka tahun 2011-2015.
2. Untuk menganalisis laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Bangka tahun 2011-2015.
3. Untuk menganalisis besarnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Bangka tahun 2011-2015.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Bangka tahun 2011-2015.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian berikutnya, yang merupakan proses pengembangan dan pengujian teori yang berhubungan dengan manajemen keuangan daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi bagi pihak Kabupaten Bangka dalam mengetahui efektivitas

pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **3. Manfaat Kebijakan**

Penulis berharap penelitian ini menjadi salah satu dasar untuk mengambil sebuah kebijakan yang sistematis dalam melaksanakan Pemerintahan di Kabupaten Bangka.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Pembahasan penelitian dibagi dalam lima bab, bab I pendahuluan, bab II landasan teori, bab III metode penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab V penutup, terakhir daftar pustaka dan lampiran masing-masing bab akan diuraikan secara rini sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan fenomena yang menjadi sumber permasalahan bagi peneliti melakukan penelitian ke dalam latar belakang masalah, merangkum pertanyaan-pertanyaan dari uraian fenomena di bagian perumusan masalah, menjabarkan jawaban yang hendak dicapai dalam penelitian ke tujuan penelitian, menjelaskan manfaat serta menguraikan penelitian ke sistematika pembahasan skripsi.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan semua teori yang relevan dengan topik penelitian, memaparkan penelitian terdahulu, dan menarik kesimpulan dari teori ke dalam kerangka berpikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan tentang variable yang digunakan pada penelitian, menentukan populasi dan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian, menjelaskan metode penelitian pengambilan sampel dan pengumpulan data, serta memaparkan metode analisis data yang digunakan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan gambaran umum Kabupaten Bangka Induk, melakukan pengolahan dan menganalisis data dengan teknik analisis yang telah ditentukan, kemudian menjelaskan hasil tersebut secara terperinci.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merangkum hasil yang diperoleh dari bab IV dan memberikan kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**